

Pengelolaan Manajemen Jenjang Pendidikan Menengah dan Khusus pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah

Slamet Winaryo

Universitas Palangka Raya

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan inovasi manajemen pelayanan pengelolaan pendidikan menengah dan khusus di Kalimantan Tengah. Bagaimanapun inovasi pelayanan manajemen pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah dalam mencapai indikator kinerja utama dalam aksesibilitas pelayanan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi, dan tata kelola pendidikan menengah dan khusus dalam mewujudkan Kalteng Berkah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif evaluatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik: (1) wawancara mendalam (*indepth interview*), (2) observasi partisipan (*participant observation*), dan (3) studi dokumentasi (*study of document*). Penetapan informan sebagai sumber data dilakukan dengan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pola interaktif Miles dan Huberman (1994). Pengecekan keabsahan data menggunakan derajat kredibilitas, transferabilitas, dan konfirmabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan kebijakan utama yaitu (1) pelayanan aksesibilitas SMA/SMK/SB; (2) pelayanan peningkatan mutu dan relevansi pendidikan SMA/SMK/SLB; dan (3) tata kelola lembaga satuan pendidikan perlu ditingkatkan dengan baik dalam upaya mencapai target indikator kunci utama yang ditetapkan. Aksesibilitas SMA/SMK/SLB masih rendah, terutama pelayanan akses pendidikan kepada masyarakat usia sekolah di daerah pedesaan/pedalaman. Demikian dengan kualitas Mutu dan Relevansi SMA/SMK/SLB masih banyak dijumpai para guru belum mampu menyajikan pembelajaran yang lebih efektif dan menyenangkan dengan bagi siswa. Hal ini disebabkan belum optimalnya proses supervisi dan pembinaan oleh pengawas sekolah. Demikian Tata Kelola Pendidikan SMA/SMK/SLB menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Kondisi saat ini yang menjadi persoalan adalah bagaimana pembinaan SMA/SMK/SLB yang berada di kabupaten/kota, sementara di kabupaten/kota belum terbentuk Cabang Dinas. Selain itu tata kelola pendidikan di sekolah masih banyak dengan sistem manual sangat berdampak terhadap tingkat kecepatan dan keakuratan informasi.

Kata Kunci: Pelayanan Akses, Mutu dan Relevansi, dan Tata Kelola

Abstract:

This research aims to improve management innovation in secondary and special education management services in Central Kalimantan. How does the Central Kalimantan Provincial Education Service innovate in education management services in achieving key performance indicators in the accessibility of education services, improving quality and relevance, and governance of secondary and special education in realizing the Blessed Central Kalimantan. This research is a descriptive evaluative research. Data collection was carried out using the following techniques: (1) in-depth interviews, (2) participant observation, and (3) study of documents. Determining informants as data sources was carried out using a purposive sampling technique. Data analysis was carried out using the interactive pattern of Miles and Huberman (1994). Checking the validity of the data uses the degree of credibility, transferability and confirmability. The research results show that in general the implementation of the main policies is (1) SMA/SMK/SB accessibility services; (2) services to improve the quality and relevance of SMA/SMK/SLB education; and (3) the governance of educational unit institutions needs to be improved in an effort to achieve the main key indicator targets set. Accessibility of SMA/SMK/SLB is still low, especially education access services for school-aged people in rural/inland areas. Thus, regarding the quality and relevance of SMA/SMK/SLB, it is still often found that teachers are not able to provide learning that is more

effective and enjoyable for students. This is due to the lack of optimal supervision and coaching processes by school supervisors. Thus, the management of SMA/SMK/SLB education is the authority of the provincial government. The current condition that is a problem is how to develop SMA/SMK/SLB in districts/cities, while in districts/cities there are no official branches yet. Apart from that, the management of education in schools is still mostly a manual system which has a big impact on the speed and accuracy of information.

Keywords: *Access Services, Quality and Relevance, and Governance*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak asasi setiap manusia sebagai makhluk social ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dalam upaya meningkatkan kualitas hidupnya dalam lingkungan keluarga maupun di masyarakat sebagai pelaku pembangunan. Oleh sebab itu pendidikan merupakan instrumen penting untuk menciptakan masyarakat yang cerdas, masyarakat yang berbudaya dan berkarakter. sebab hanya melalui pendidikan manusia akan terlepas dari kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan (Dedy Mulyasana, 2011).

Selain itu pembangunan pendidikan juga menjadi tujuan negara sebagaimana pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945 bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Betapa pentingnya persoalan mencerdaskan bangsa bagi suatu negara, sehingga para pendiri negara (*founding fathers*) sejak awal berdirinya negara telah dipikirkan jauh kedepan terhadap pentingnya bangsa yang cerdas, bangsa yang berkualitas, bangsa yang berkarakter. Sehingga dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (1), (2), (3) dan (4) diatur dengan jelas terhadap hak warga negara memperoleh pelayanan pendidikan, dan kewajiban negara memberikan penjaminan hak pendidikan setiap warga negara dengan baik. Pasal 31 ayat (1) bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pasal 31 ayat (3)

pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dengan diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang efektif sejak Tahun 2001, yang diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 membawa perubahan pelaksanaan pemerintahan di daerah yang sangat berarti, terutama dalam semangat membangun di daerah. Urusan pemerintahan konkuren akan sangat menentukan berhasil tidaknya penyelenggaraan otonomi daerah, karena kewenangan yang ada telah dibagi habis antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk dilaksanakan secara bersama-sama. Selanjutnya dalam penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan dalam pemerintahan, dimana bidang pendidikan merupakan urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh karena sangat berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Sesuai lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa pemerintah provinsi bertanggung jawab pendidikan menengah dan khusus, dan pada bulan

Oktober 2016 personalia, sarana prasarana, pendanaan, dan dokumen (P3D) pendidikan menengah dan khusus (SMA, SMK, SLB) telah diserahkan terimakan dari pemerintah kabupaten/kota se Kalimantan Tengah kepada pemerintah provinsi Kalimantan Tengah.

SOPD Dinas Pendidikan dengan Tipologi A dengan pejabat Kepala Dinas dibantu 5 (lima) orang eselon III dan dibantu 15 eselon IV dengan jumlah pegawai sebanyak 404 orang merupakan kekuatan yang besar dalam memberikan pelayanan prima, guna mewujudkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021, dengan Visi : Kalimantan Tengah maju, mandiri dan adil untuk kesejahteraan segenap masyarakat menuju Kalimantan Tengah BERKAH (bermartabat, elok, religius, kuat, amanah, dan harmonis), serta Misi ke 6 (enam) pendidikan, kesehatan, dan pariwisata. Dengan sasaran capaian utama Indeks Pembangunan Manusia (IPM tahun 2021 sebesar 72,50. Rata-rata Lama Sekolah tahun 2021/2022 sebesar 10 tahun, serta Angka harapan Usia Sekolah tahun 2021/2022 sebesar 15,00 tahun.

Sesuai indikator kinerja utama akses pendidikan, mutu dan relevansi pendidikan, dan tata kelola pendidikan menengah dan khusus dalam mewujudkan Kalteng Berkah sasaran target capaian indikator utama tahun 2021 : APK SMA/SMK/SKB sebesar 97,43%; APM sebesar 77,62%; lulusan melanjutkan ke SMA/SMK/SMLB 85,85%; seluruh Kecamatan memiliki minimal 1 (satu) sekolah menengah; angka siswa putus sekolah sebesar 0,60%; Rata-Rata Nilai Ujian Nasional 6,5; rata-rata siswa

membaca 4 jam per hari; SMA terakreditasi B sekurang-kurangnya 85%; SMK terakreditasi B sekurang-kurangnya 75%; profesionalisme guru/kepala sekolah/pengawas sebesar 97,01%.

Dari hasil observasi penelitian pada penyelenggaraan pendidikan menengah dan khusus di Kalimantan Tengah masih terdapat beberapa permasalahan dalam peningkatan mutu, aksesibilitas dan tata kelola sebagai berikut. (1) Aksesibilitas SMA/SMK/SMLB : a. Aksesibilitas dan pemerataan Pendidikan SMA/SMK/SLB belum merata; b. Masih tingginya siswa yang putus sekolah; c. Angka melanjutkan pendidikan dasar ke jenjang pendidikan menengah masih rendah; d. Belum semua kecamatan di Kalimantan Tengah memiliki pendidikan menengah dan khusus; dan Rasio perbandingan SMA dan SMK masih belum seimbang.

Beberapa permasalahan pendidikan jenjang SMA/SMK/SLB untuk Mutu dan Relevansi yaitu (1) Masih rendahnya kualitas karakter bangsa; (2) Satuan Pendidikan masih banyak belum Terakreditasi; (3) Kualifikasi pendidikan Guru masih banyak belum S1; (4) Sistem pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah; (5) Satuan Pendidikan belum berstandar Nasional Pendidikan; (6) Lama Rata-Rata siswa membaca masih rendah; dan (7) Relevansi dan Daya Saing Lulusan SMK masih rendah.

Demikian permasalahan Tata Kelola Pendidikan SMA/SMK/SLB yaitu : (1) Sistem tata kelola manajemen sekolah belum berbasis teknologi informasi; (2) Sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program/kegiatan sekolah perlu ditingkatkan; (3) Peran dan fungsi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah belum maksimal; (4) Sistem evaluasi dan

supervisi pengawas sekolah belum maksimal;

Betolak dari penjelasan di atas maka secara umum tujuan penelitian ini sebagai “Inovasi Dan Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Menengah dan Khusus Untuk Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Demi Terwujudnya Kalimantan Tengah BERKAH”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif evaluatif yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai SOPD penyelenggara pendidikan pada jenjang pendidikan menengah dan khusus di Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena atau hubungan antar fenomena yang diselidiki (Suprayogo dan Tobroni, 2001). Dalam pelaksanaannya penelitian deskriptif dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan evaluatif, dimana peneliti bermaksud mengumpulkan data tentang implementasi dari suatu kebijakan/program yang sudah dilakukan (Arikunto, 2010). Pendekatan evaluatif pada dasarnya terpusat pada rekomendasi akhir yang menegaskan bahwa suatu obyek evaluasi dapat dipertahankan, ditingkatkan, diperbaiki atau bahkan diberhentikan sejalan dengan data yang diperoleh. Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik: (1) wawancara mendalam (*indepth interview*), (2) observasi partisipan (*participant observation*), dan (3) studi dokumentasi (*study of document*). Analisis data dilakukan dengan menggunakan pola interaktif Miles dan Huberman (1994). Pengecekan keabsahan data yang diperoleh

dilakukan dengan menggunakan derajat kepercayaan (*credibility*) melalui teknik triangulasi baik sumber maupun metode.

PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian dalam peningkatan pelayanan pendidikan jenjang pendidikan menengah dan khusus pada SOPD Dinas provinsi Kalimantan Tengah dalam 3 (tiga) kebijakan utama yaitu (1) pelayanan aksesibilitas SMA/SMK/SB; (2) pelayanan peningkatan mutu dan relevansi pendidikan SMA/SMK/SLB; dan (3) tata kelola lembaga satuan pendidikan dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pelayanan Aksesibilitas MA/SMK/SLB.

Pelayanan akses pendidikan kepada masyarakat usia sekolah di daerah pedesaan/pedalaman harus menjadi prioritas pemerintah untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/SMLB di Kalimantan Tengah yang masih rendah. Persoalan putus sekolah bagi siswa di pedesaan juga cukup tinggi akibat ekonomi yang tidak mampu. Solusinya adalah pemberian bea siswa, dan jika memungkinkan dapat diasramakan dengan diberi bantuan akomodasi dan konsumsi pada siswa yang tidak mampu.

Selanjutnya untuk meningkatkan daya tampung APK SMA/SMK/SMLB perlu strategi yang tepat, karena target APK tahun 2017/2018 sebesar 87,91% dan target tahun 2021/2022 sebesar 97,43% atau harus mampu mencapai peningkatan APK rata-rata 2,50% pertahunnya. Demikian terget APM tahun 2017 sebesar 77,54%, dan tahun 2021/2022 sebesar 89,62%. Solusi capaian melalui pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), dan Unit Sekolah Baru (USB), serta

pembangunan asrama pada SMA/SMK di daerah tertentu untuk menampung siswa yang berasal dari daerah pedalaman. Oleh sebab itu diperlukan sebuah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan program dan kegiatan peningkatan akses dengan baik.

Pelayanan Mutu dan Relevansi SMA/SMK/SLB

Mutu pendidikan yang baik akan sangat berpengaruh terhadap kualitas karakter bangsa, dan untuk memperoleh mutu pendidikan yang baik hanya diperoleh dari proses pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Masih banyak dijumpai para guru belum mampu menyajikan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Hal ini disebabkan tidak berjalannya proses supervisi dan pembinaan oleh pengawas sekolah. Solusinya adalah para guru harus diberikan penyegaran keilmuan melalui diklat, bintek, diskusi dalam forum MGMP dengan dibimbing para pengawas sekolah. Jumlah pengawas sekolah SMA/SMK/SLB sebanyak 102 orang sangat memadai dengan jumlah lembaga SMA/SMK/SMLB yang ada. Dapat dipastikan dengan sistem pembinaan dan pengawasan yang baik oleh para pengawas sekolah, diharapkan motivasi guru untuk berbuat yang terbaik akan muncul. Sebab pengawas berperan sebagai supervisor dan pembina sekolah bukan berperan sebagai penilai guru, hal ini sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah dan Permendiknas Nomor 143 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas bahwa pengawas memiliki tugas

dan tanggung jawab membina minimal 7 sekolah sampai 10 sekolah.

Mutu dan relevansi pendidikan dapat digambarkan dari tingkat capaian akreditasi sekolah dan kualitas lulusannya, sebagaimana diatur dalam PP No 19 tahun 2005 jo. PP No 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Permendiknas Nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, bahwa mutu lembaga pendidikan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kualifikasi yaitu Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Nasional Pendidikan (SNP), dan Standar Mutu Pendidikan diatas Standar Nasional Pendidikan (Rujukan).

Target capaian Indek Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2017 sebesar 69,30 dan tahun 2021 sebesar 72,50. Rata-rata Lama Sekolah tahun 2017 sebesar 8,50 tahun dan tahun 2021 sebesar 10 tahun atau peningkatan 1,50 tahun, maka perlu ditingkatkan angka partisipasi pendidikan menengah (usia 15 tahun ke atas). Demikian Angka harapan Usia Sekolah tahun 2017 sebesar 12,75 tahun dan tahun 2021 sebesar 15,00 tahun.

Capaian akreditasi SMA berjumlah 232 lembaga, yang memperoleh akreditasi A sebesar 27,27% atau 45 satdik, akreditasi B sebesar 42,42%, akreditasi C sebesar 26,67%. Sedangkan SMK berjumlah 311 program keahlian, yang memperoleh akreditasi A sebesar 26,94%, akreditasi B sebesar 42,39%, akreditasi C sebesar 24,35%. Dari data akreditasi ini sangat jelas bahwa mutu pendidikan di Kalimantan Tengah pada katagori sedang, selanjutnya perlu dilakukan pembenahan terhadap 8 (delapan) standar nasional pendidikan. Oleh sebab itu diperlukan sebuah pembinaan, pengawasan dan

pengendalian dalam fungsi dan proses manajemen dalam pelaksanaan program dan kegiatan peningkatan mutu pendidikan menengah dan khusus dengan baik.

Tata Kelola Lembaga Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB

Sesuai Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa lembaga satuan pendidikan jenjang menengah dan khusus (SMA, SMK, dan SLB) menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Kondisi saat ini yang menjadi persoalan adalah bagaimana pembinaan SMA, SMK, SLB yang berada di kabupaten/kota, sementara di kabupaten/kota belum terbentuk Cabang Dinas. Sedangkan sekolah perlu konsultasi dan koordinasi berbagai persoalan yang perlu segera diselesaikan secara cepat dan efisien. Oleh sebab itu dalam inovasi pelayanan yang dilakukan adalah memberdayakan fungsi dan tugas pengawas sekolah dan memberikan tugas pembantuan di kabupaten/kota.

Tata kelola pendidikan di sekolah masih banyaknya dengan sistem manual, sehingga sangat berdampak terhadap tingkat kecepatan dan keakuratan dan transparansi data informasi. Kedepan harus melakukan inova pelayanan tata kelola berbasis teknologi informasi. Demikian halnya mengoptimalkan peran dan fungsi Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota dan provinsi, serta peran dan fungsi Komite Sekolah harus dilakukan dengan mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Selanjutnya untuk membentuk Komite Sekolah dapat mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016. Komite Sekolah berperan

dalam mendukung pelayanan mutu pendidikan di sekolah. Selain itu Komite Sekolah dalam melaksanakan fungsinya bertugas memberikan pertimbangan, menggalang dana dari masyarakat sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Selain itu Komite Sekolah juga berfungsi mengawasi pelayanan pendidikan, dan menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi peserta didik dan orang tua/wali dan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pemahasan penelitian di atas, maka dapat disimpulkan (1) Inovasi dalam pelayanan publik bidang pendidikan harus dilakukan dengan konsisten dan kontinyu, terutama dalam menciptakan *school based management* dan transparansi; (2) Profesionalisme dan kompetensi para Kepala Sekolah, Guru, dan Pengawas Sekolah akan sangat menentukan kualitas inovasi dan pelayanan publik di lingkungan satuan pendidikan; (3) Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah keberadaannya harus difungsikan dengan baik dalam pelayanan pendidikan di sekolah; (4) Inovasi dan Pelayanan Pendidikan Menengah akan dioptimalkan Peran Pengawas Sekolah SMA/SMK/SLB di kabupaten/kota. Selanjutnya untuk meningkatkan pelayanan dan inovasi dalam jenjang pendidikan menengah dan khusus maka sarankan hal-hal berikut : (1) Perlu dibentuk pejabat pengelola pendidikan SMA/SMK/SLB di kabupaten/kota dalam Tugas Pembantuan; (2) Perlu solusi segera penggajian guru honor, penyediaan dana BOS daerah, dan tunjangan daerah guru/kepala sekolah/pengawas; (3) Perlu fokus dalam prioritas pembangunan sarana dan prasarana gedung, peralatan

laboratorium, perpustakaan, asrama siswa untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mutu pendidikan yang tergambar dalam peringkat akreditasi sekolah; (4) Perlu disediakan anggaran beasiswa S1 bagi para lulusan berprestasi, terutama dari sekolah di pedalaman; (5) Perlu dukungan peningkatan angka partisipasi pendidikan tinggi di Kalimantan Tengah, dengan menyediakan beasiswa reguler bagi mahasiswa berprestasi dan kurang mampu.

Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dalam proses manajemen pendidikan menengah dan khusus kata kunci yang akan sangat menentukan capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi dan Abdul Jabar, Safrudin Cepi. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Dunn, William N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 2003.
- Fattah, Nanang. *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- , *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Lubis, M. Solly. *Kebijakan Publik*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M., *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI-Press, 1994
- Mulyasana, Dedy. *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 2015-2019
- Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021.
- Suprayogo, I., & Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001
- Syafaruddin. *Efektivitas Kebijakan Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Sallis, Edward. *Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan*. Jogjakarta: IRCiSoD, 2010.
- Tilaar, HAR. *Manajemen Pendidikan Nasional*. Bandung: Rosdakarya, 2008.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Winarno, Budi. *Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Caps, 2012.